



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 060. 2/656/WK-PYK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik, untuk itu diperlukan peta proses bisnis bagi setiap instansi pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan peta proses bisnis Pemerintah Kota Payakumbuh sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, peta proses pemerintah Kota Payakumbuh perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Payakumbuh.

KEDUA : Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Tujuan dari penyusunan peta proses bisnis ini agar setiap instansi pemerintah :

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan;
- c. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah :

- a. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah;
- b. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

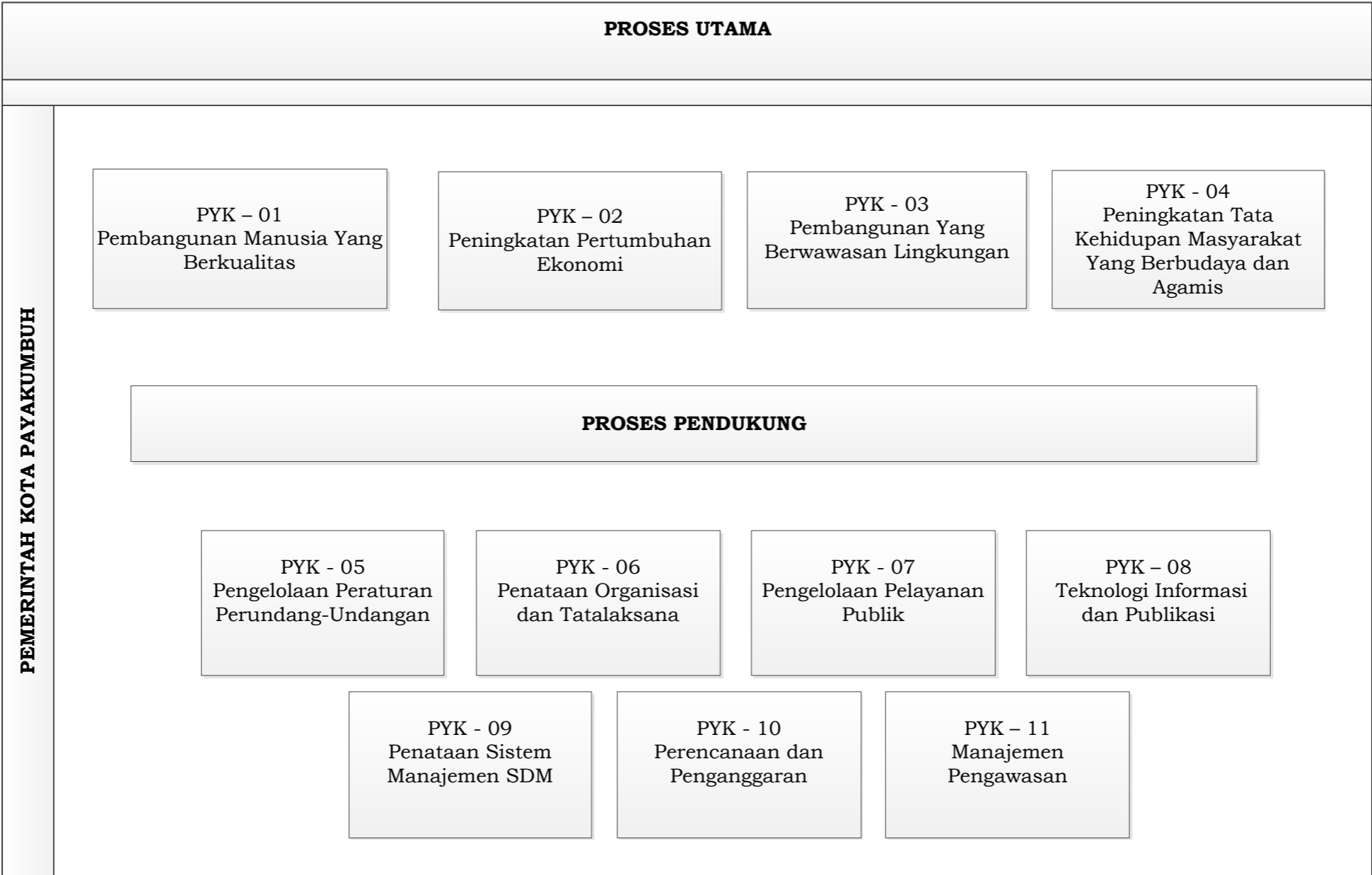
- KETIGA : Peta proses bisnis disusun sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat c/q. Kepala Biro Organisasi di Padang.
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
3. Sdr. Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
5. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh di Payakumbuh.



PETA SUB PROSES

PYK - 01
Pembangunan Manusia Yang Berkualitas

PYK - 01.1
Peningkatan Kualitas Pendidikan

PYK - 01.2
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Masyarakat

PYK - 01.3
Penguatan Pemberdayaan Perempuan

PYK - 01.4
Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan
dan Pengangguran

PETA RELASI

PYK - 01.1
Peningkatan Kualitas Pendidikan Yang Berdaya Saing

Dinas Pendidikan

Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga

DP3AP2KB

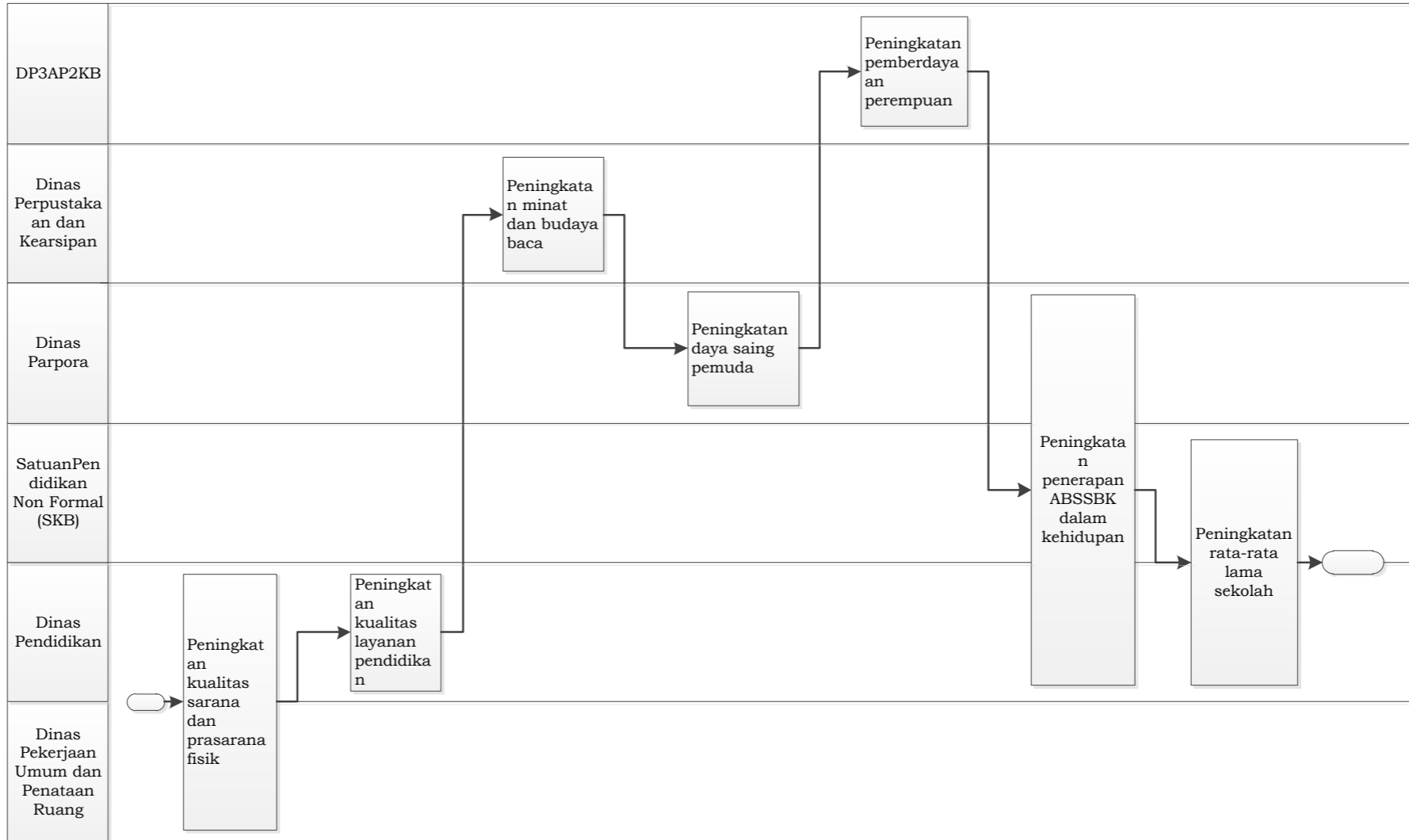
Satuan Pendidikan Non Formal (SKB)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 01.1
 Peningkatan Kualitas Pendidikan Yang Berdaya Saing



PETA RELASI

PYK - 01.2
Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit/ Puskesmas

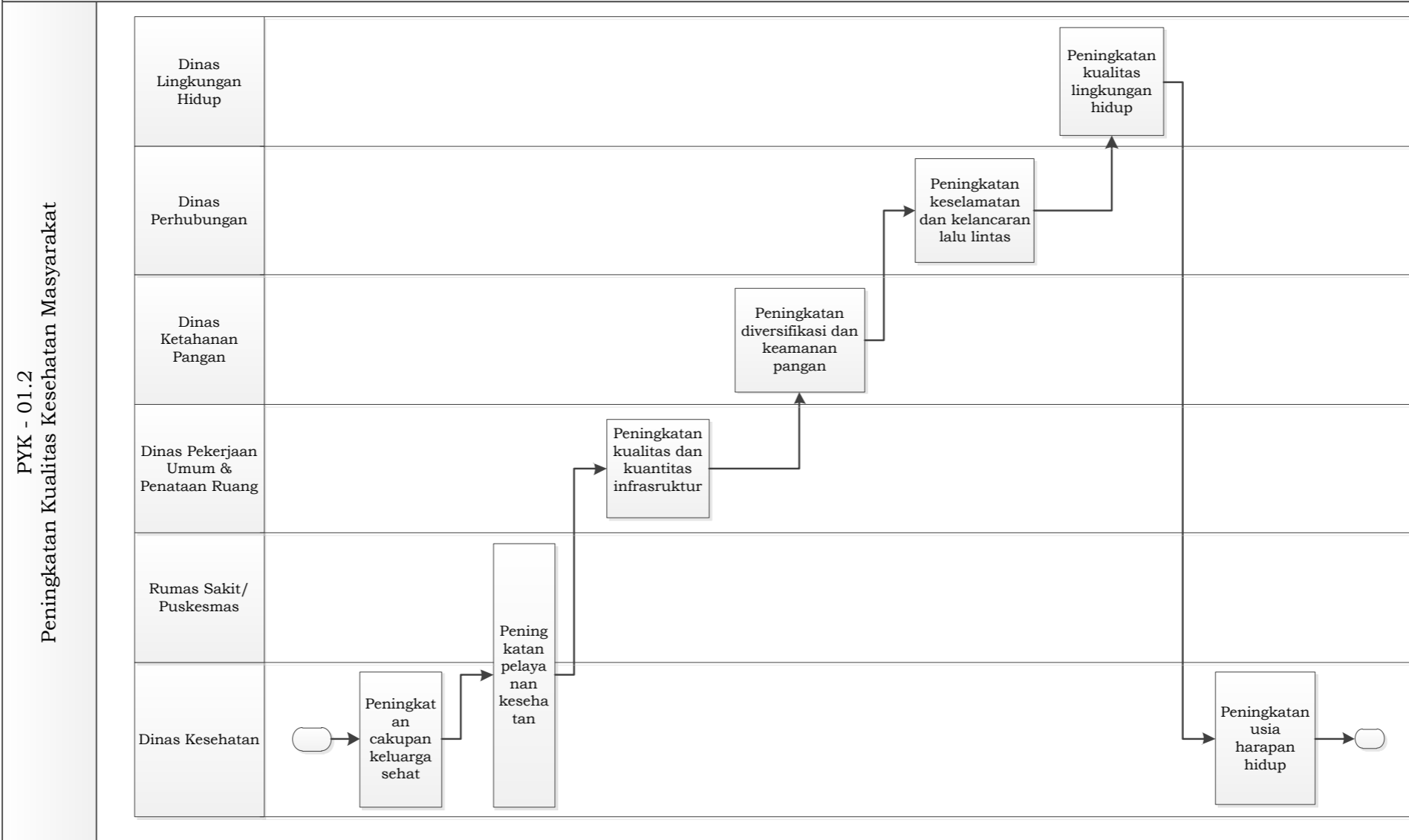
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Perhubungan

PETA LINTAS FUNGSI



PETA RELASI

PYK - 01.3
Penguatan Pemberdayaan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

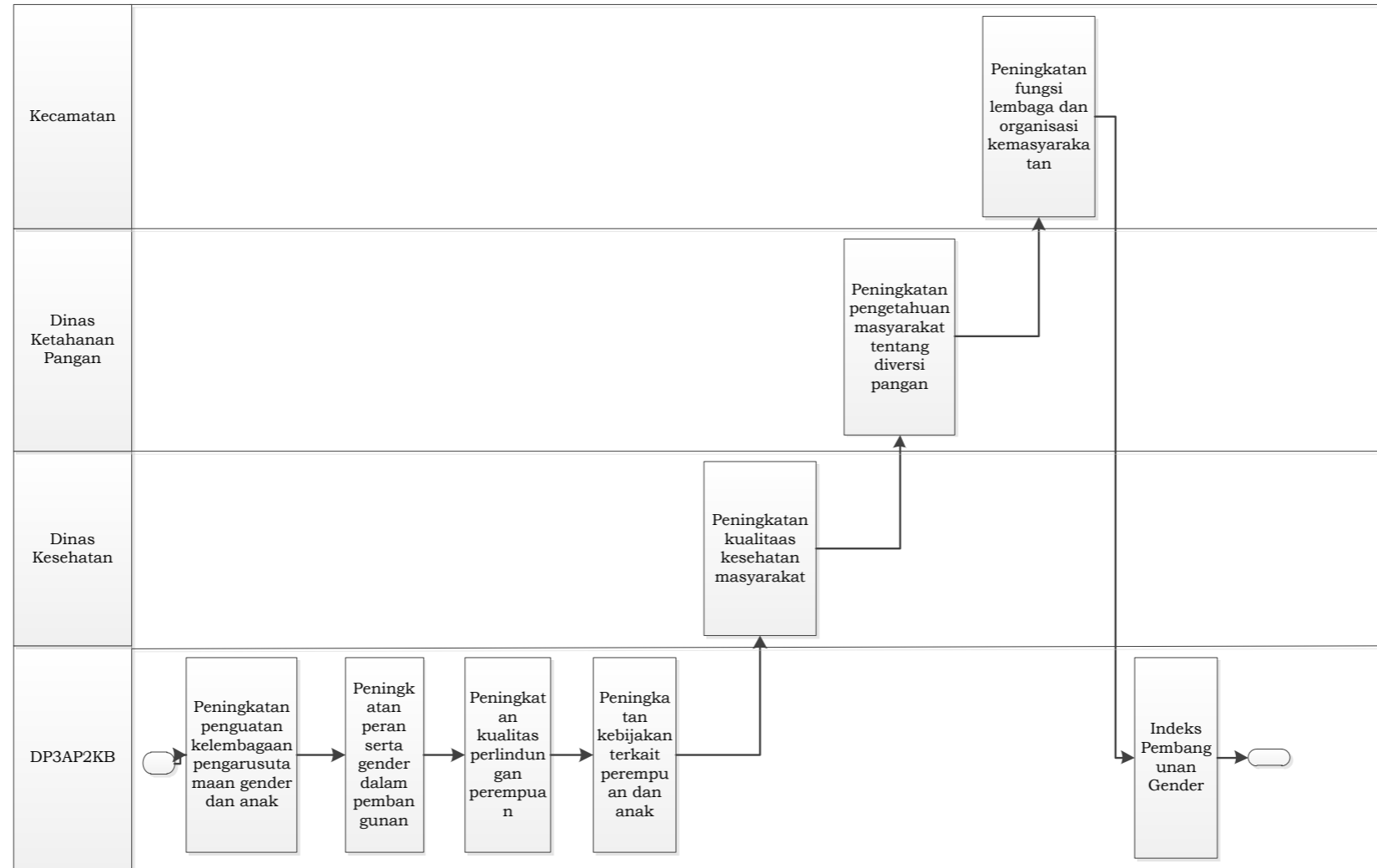
Dinas Kesehata

Kecamatan

Dinas Ketahanan Pangan

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 01.3
Penguatan Pemberdayaan Perempuan



PETA RELASI

PYK - 01.4
Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

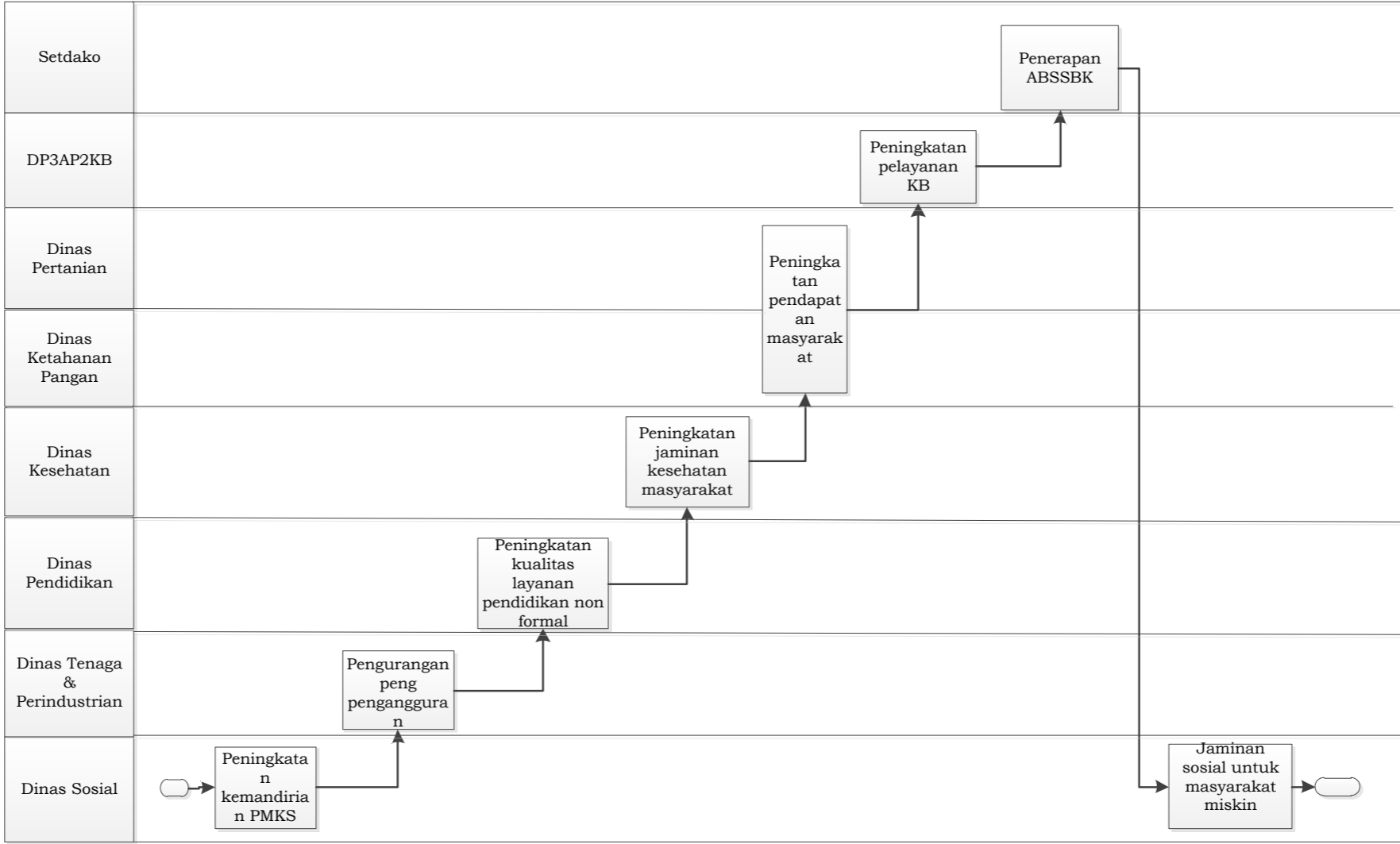
Dinas Pertanian

Setdako

DP3AP2KB

PETA LINTAS FUNGSI

Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
 PYK - 01.4



PETA SUB PROSES

PYK - 02
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

PYK - 02.1
Peningkatan sektor Produktivitas Strategis

PYK - 02.2
Peningkatan Iklim Usaha dan Investasi

PETA RELASI

PYK - 02.1
Peningkatan Sektor Produktivitas Strategis

Dinas Pertanian

Dinas Koperasi & UKM

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

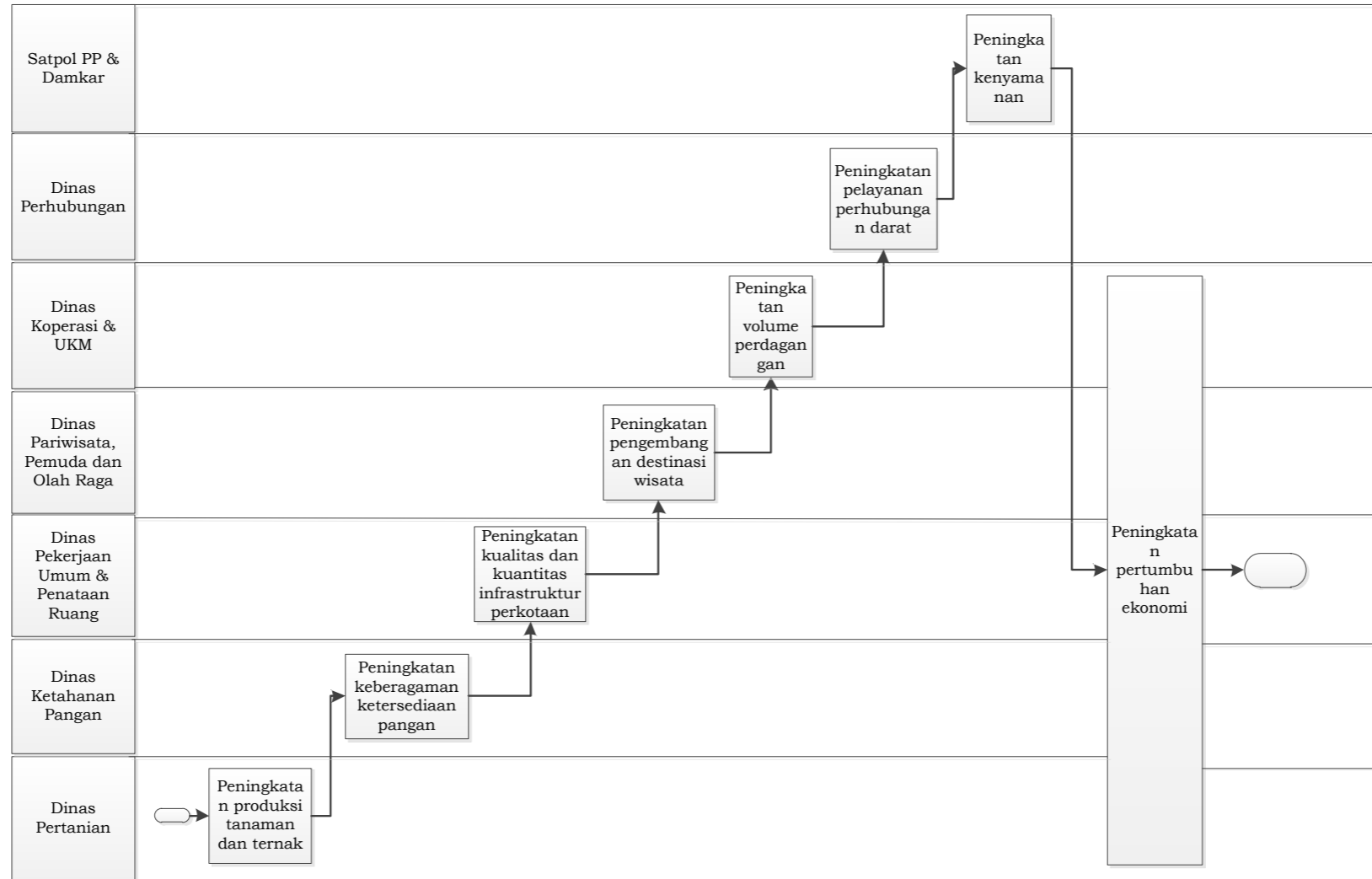
Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga

Dinas Perhubungan

Satpol PP & Damkar

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 02.1
Peningkatan Sektor Produktivitas Strategis



PETA RELASI

PYK - 02.2
Peningkatan Iklim Usaha dan Investasi

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Dinas Koperasi & UKM

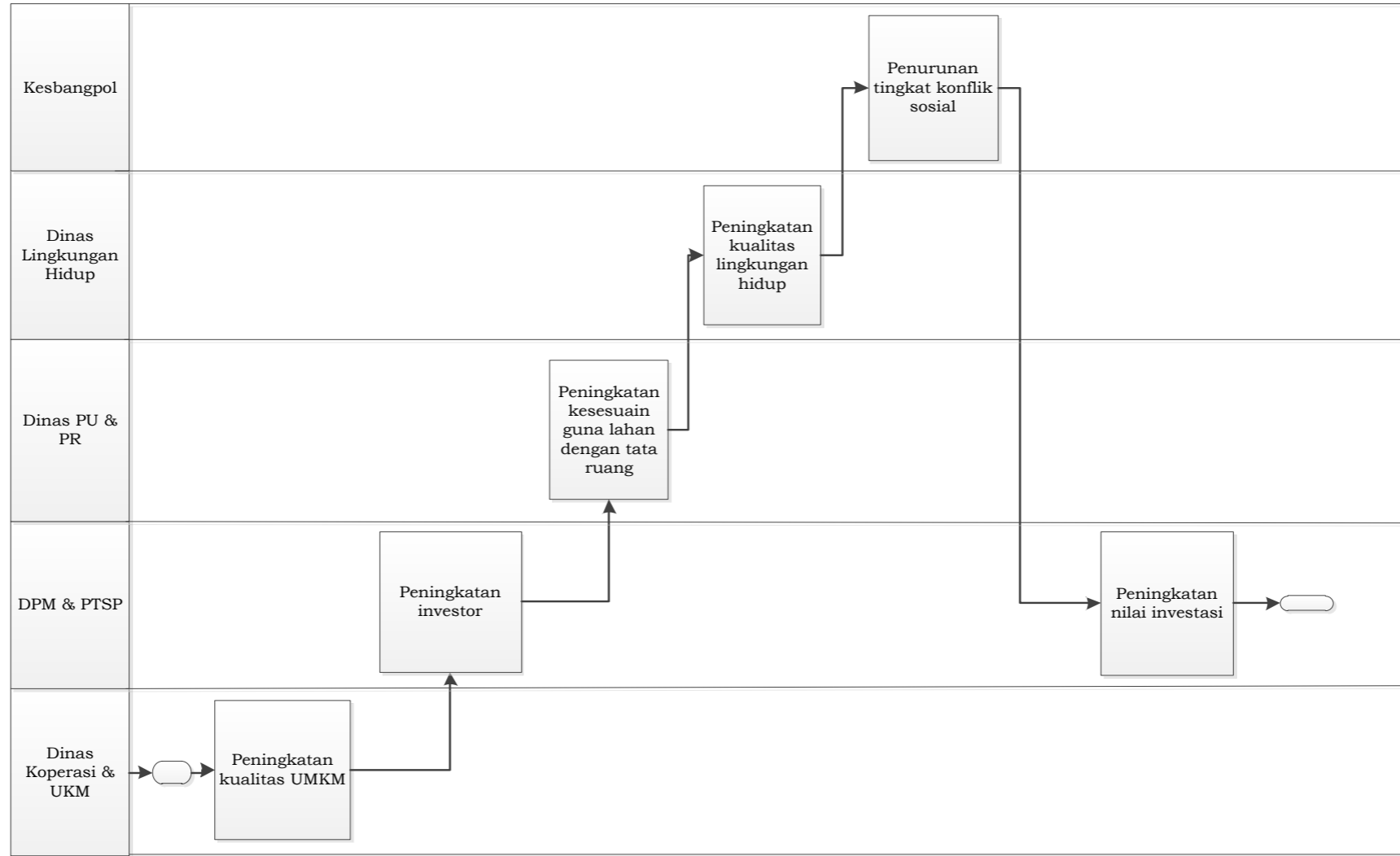
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

Dinas Lingkungan Hidup

Kesbangpol

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 02.2
Peningkatan Iklim Usaha dan Investasi



PETA SUB PROSES

PYK - 03
Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan

PYK - 03.1
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Infrastruktur Perkotaan

PYK - 03.2
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

PETA RELASI

PYK – 03.1
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan

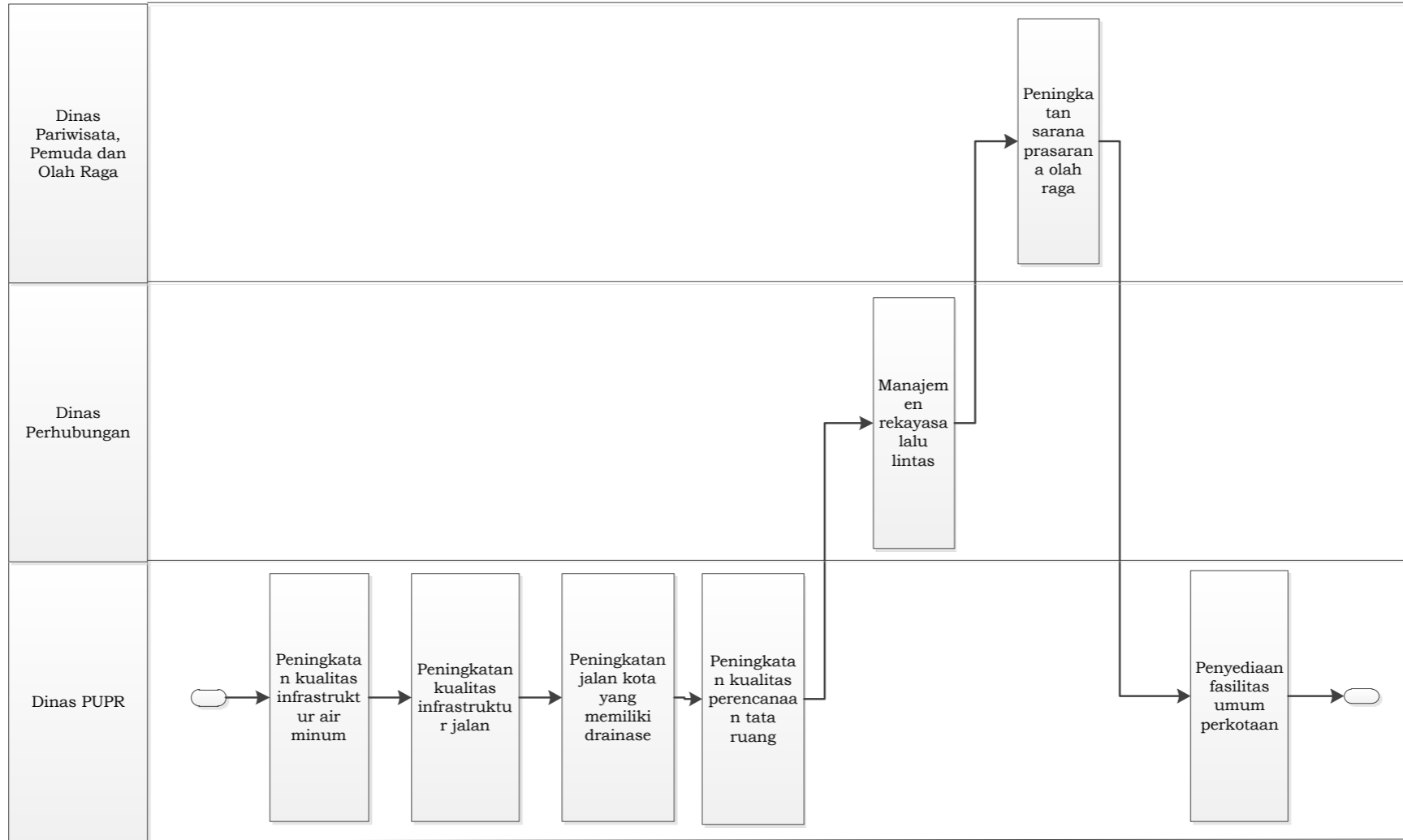
Dinas PUPR

Dinas Perhubungan

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah
Raga

PETA LINTAS FUNGSI

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan
PYK - 03.1



PETA RELASI

PYK - 03.2
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pertanian

Dinas Perhubungan

Dinas PU & PR

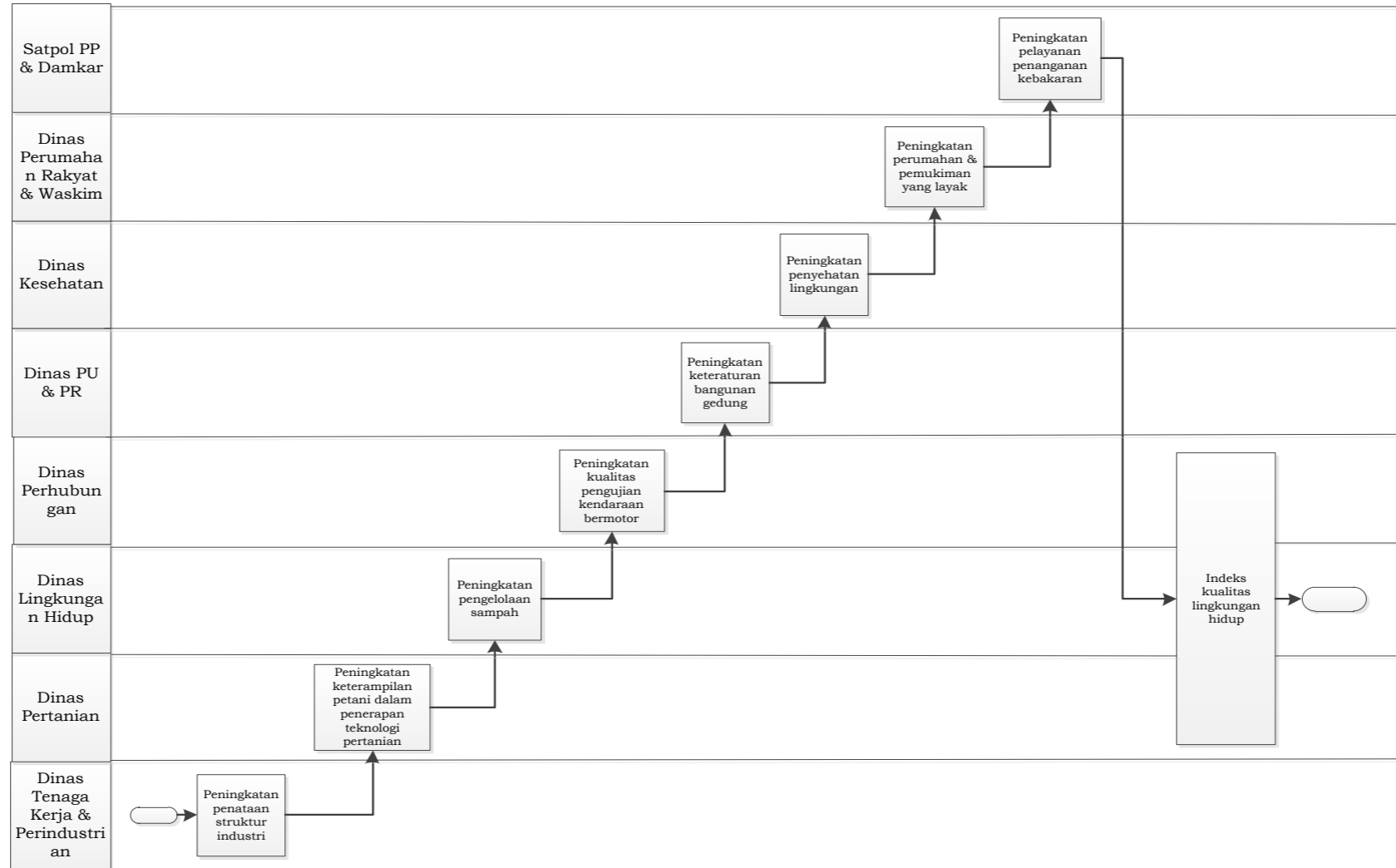
Dinas Kesehatan

Dinas Perumahan & Kawasan
Pemukiman

Satpol PP & Damkar

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 03.2
 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup



PETA SUB PROSES

Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Agamis
PYK - 04

PYK - 04.1
Peningkatan penerapan ABS SBK dalam
perilaku masyarakat

PETA RELASI

PYK - 04.1
Peningkatan penerapan ABS SBK dalam perilaku masyarakat

Dinas Pendidikan

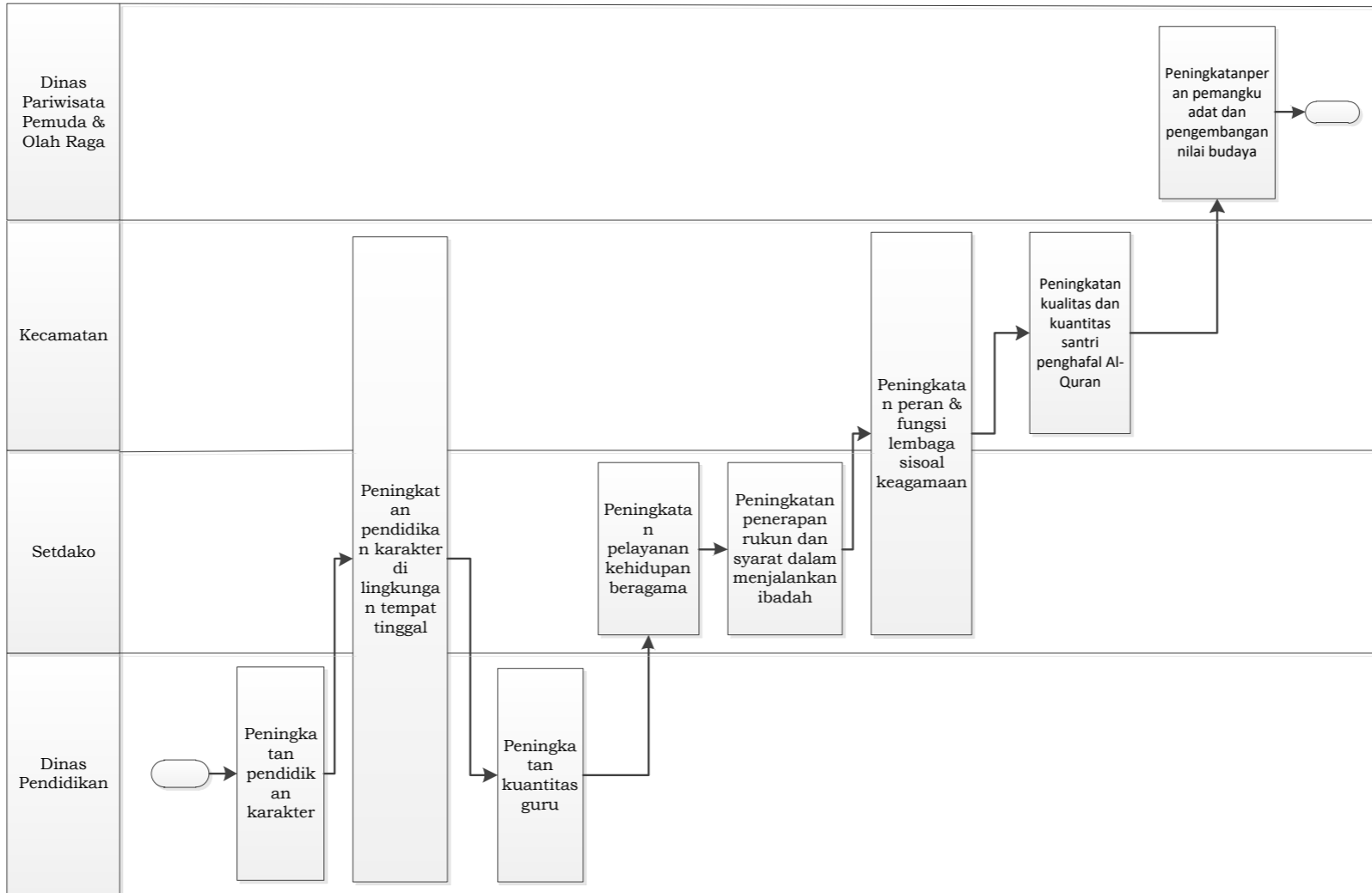
Setdako

Kecamatan

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 04.1
Peningkatan Pengalaman Ajaran Agama



PETA SUB PROSES

PYK - 05
Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan

PYK - 05.1
Peningkatan Kualitas Produk Hukum
Daerah

PYK - 05.2
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat
Terhadap Produk Hukum Daerah

PETA RELASI

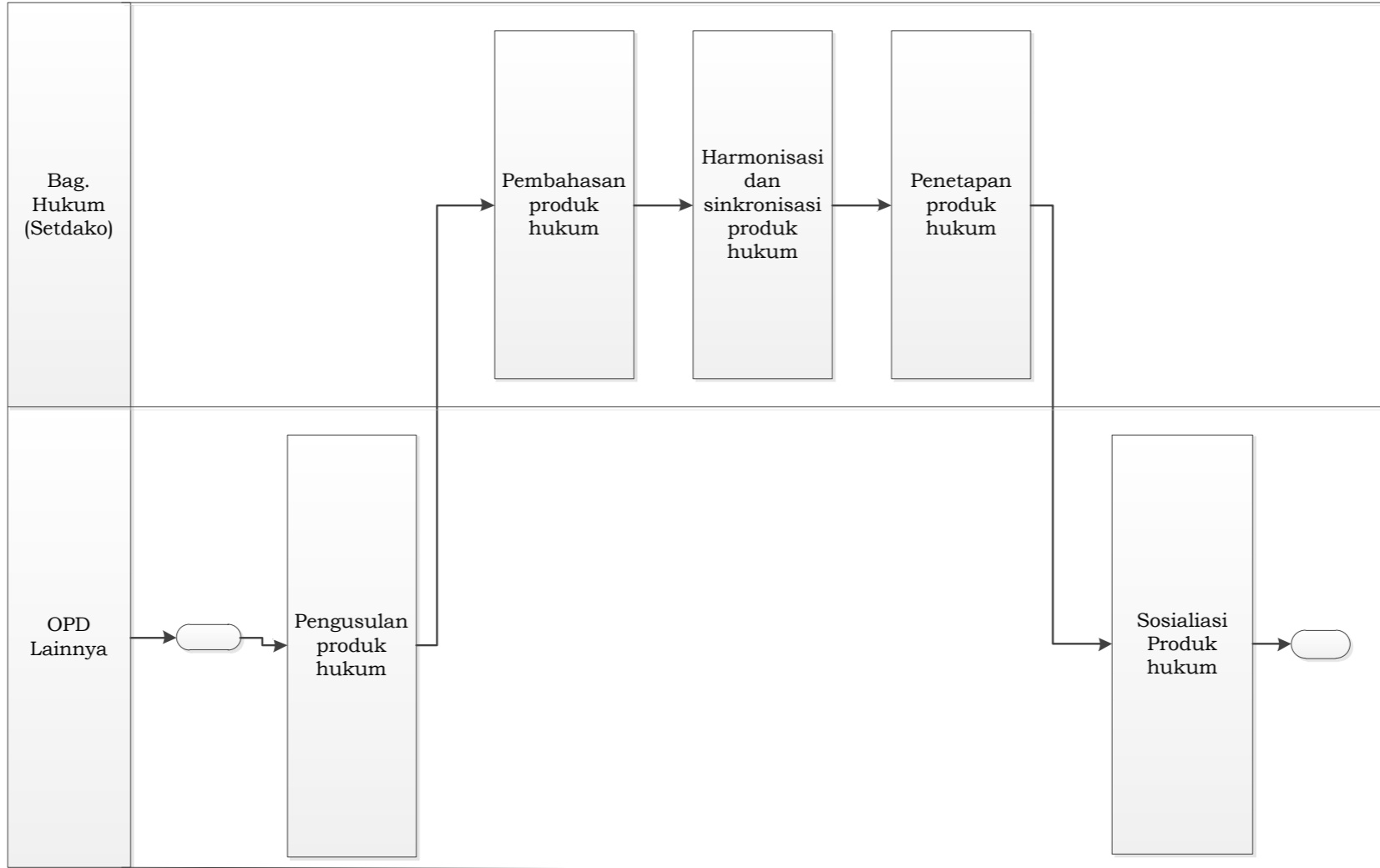
PYK - 05.1
Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

Bagian Hukum (Setdako)

OPD Lainnya

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 05.1
Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah



PETA RELASI

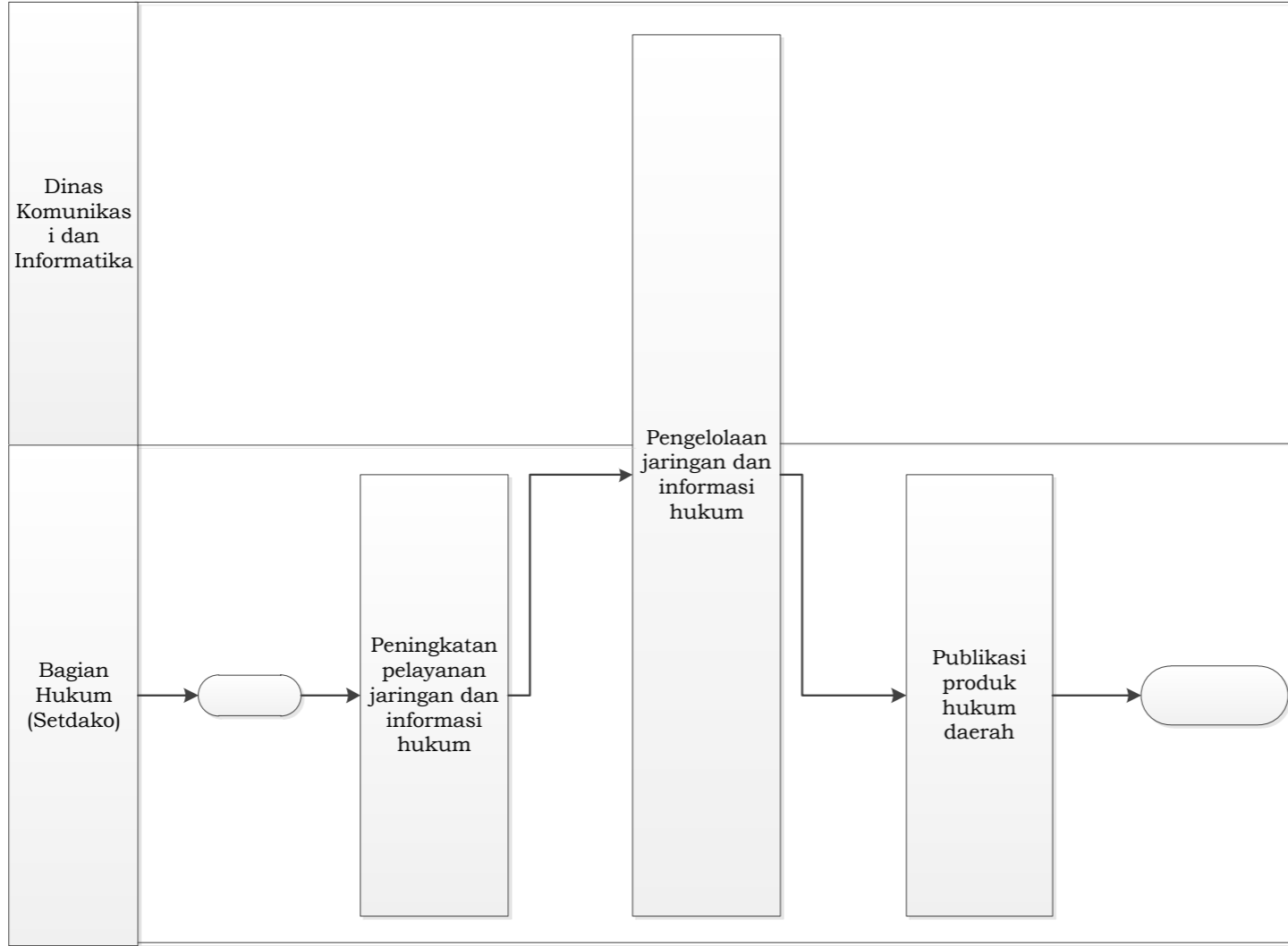
PYK - 05.2
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah

Bagian Hukum

Dinas Komunikasi dan Informatika

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 05.2
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah



PETA RELASI

PYK - 05.3
Peningkatan Penyelesaian Kasus Hukum

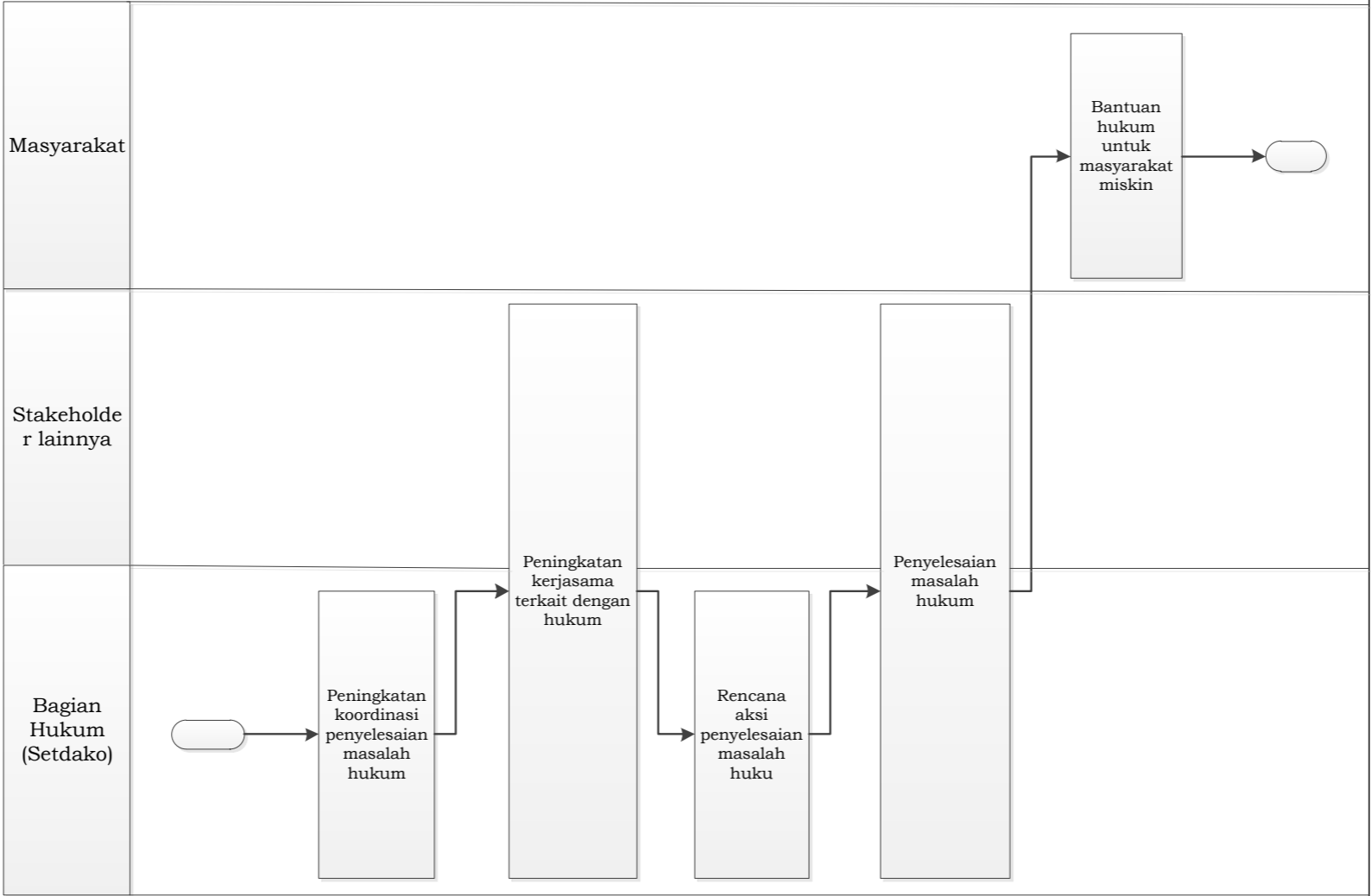
Setdako

Stakeholder lainnya

Masyarakat

PETA LINTAS FUNGSI

Peningkatan Penyelesaian Kasus Hukum
PYK - 05.3



PETA SUB PROSES

PYK - 06
Pengelolaan Organisasi dan Tataaksana

PYK - 06.1
Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah

PYK - 06.2
Tata Kelola Pemerintahan

PETA RELASI

PYK – 06.1
Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah

Bappeda

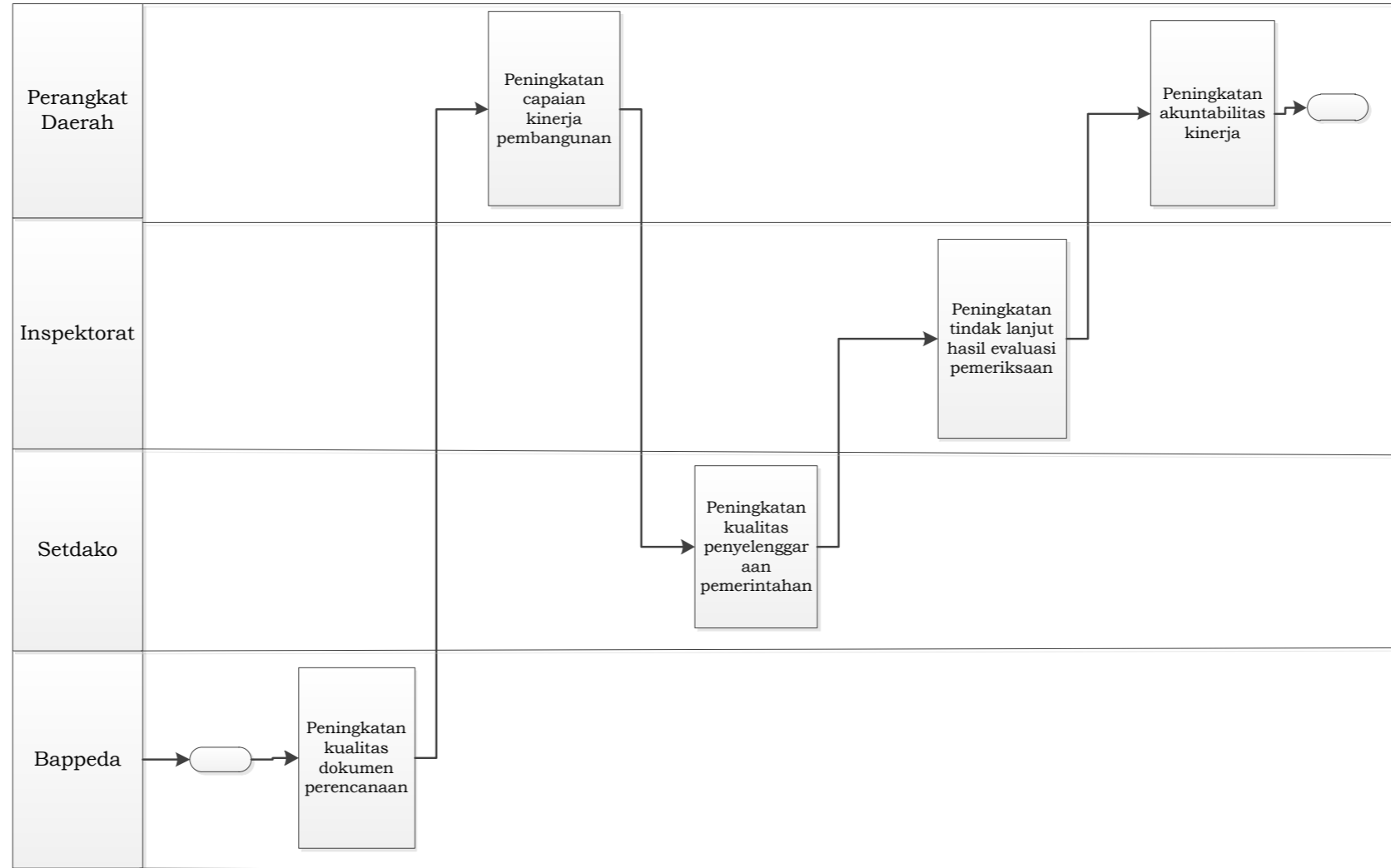
Inspektorat

Organisasi

OPD Lainnya

PETA LINTAS FUNGSI

PYK – 06.1
Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Pemerintah Daerah



PETA RELASI

PYK - 06.2
Tata Kelola Pemerintahan

Bagian Pemerintahan

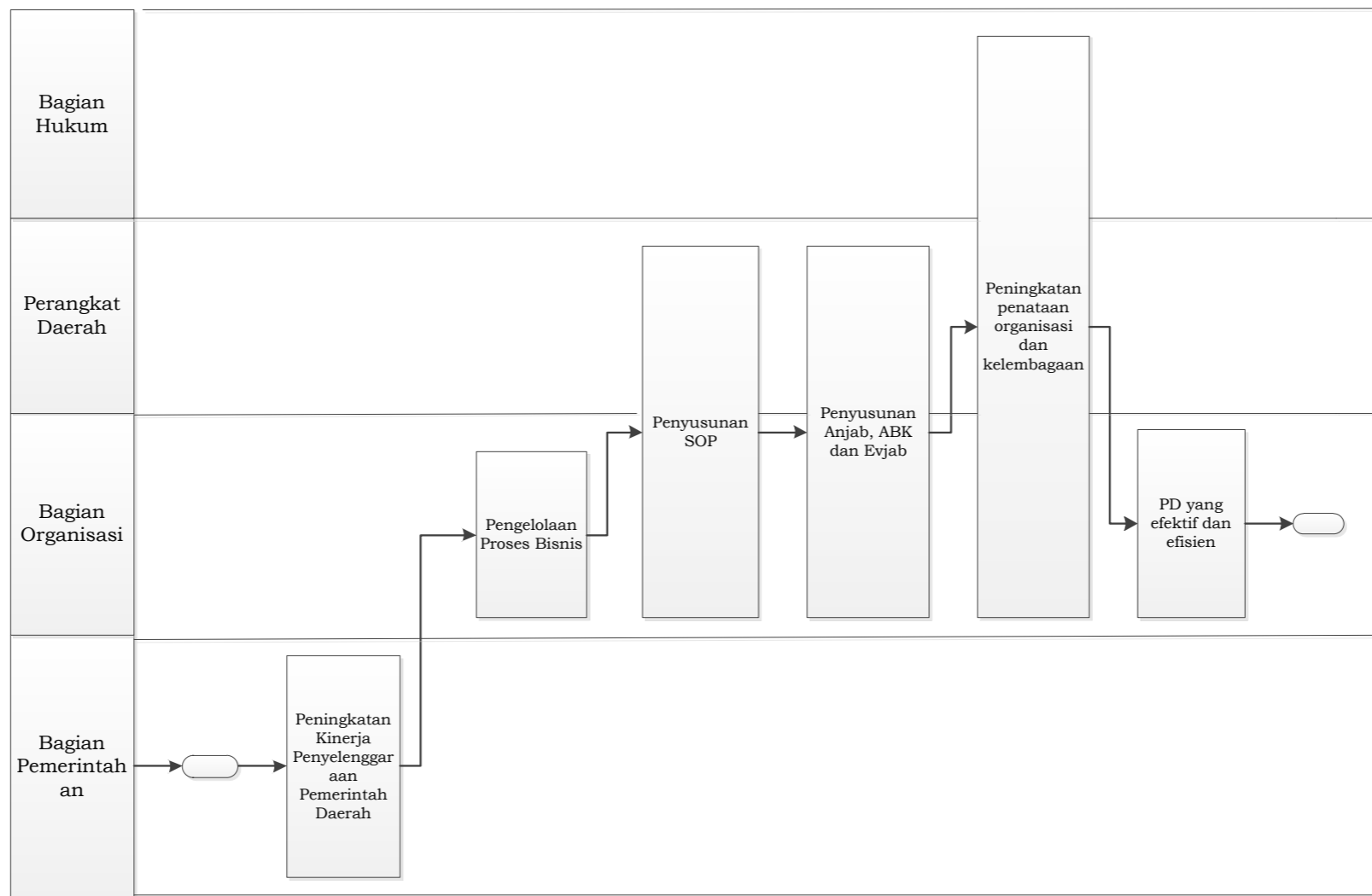
Bagian Organisasi

Bagian Hukum

OPD Lainnya

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 06.2
Tata Kelola Pemerintahan



PETA SUB PROSES

PYK - 07
Pengelolaan Pelayanan Publik

PYK - 07.1
Peningkatan Sistem Pelayanan Publik

PYK - 07.2
Peningkatan inovasi pelayanan publik

PETA RELASI

PYK – 07.1
Peningkatan Sistem Pelayanan Publik

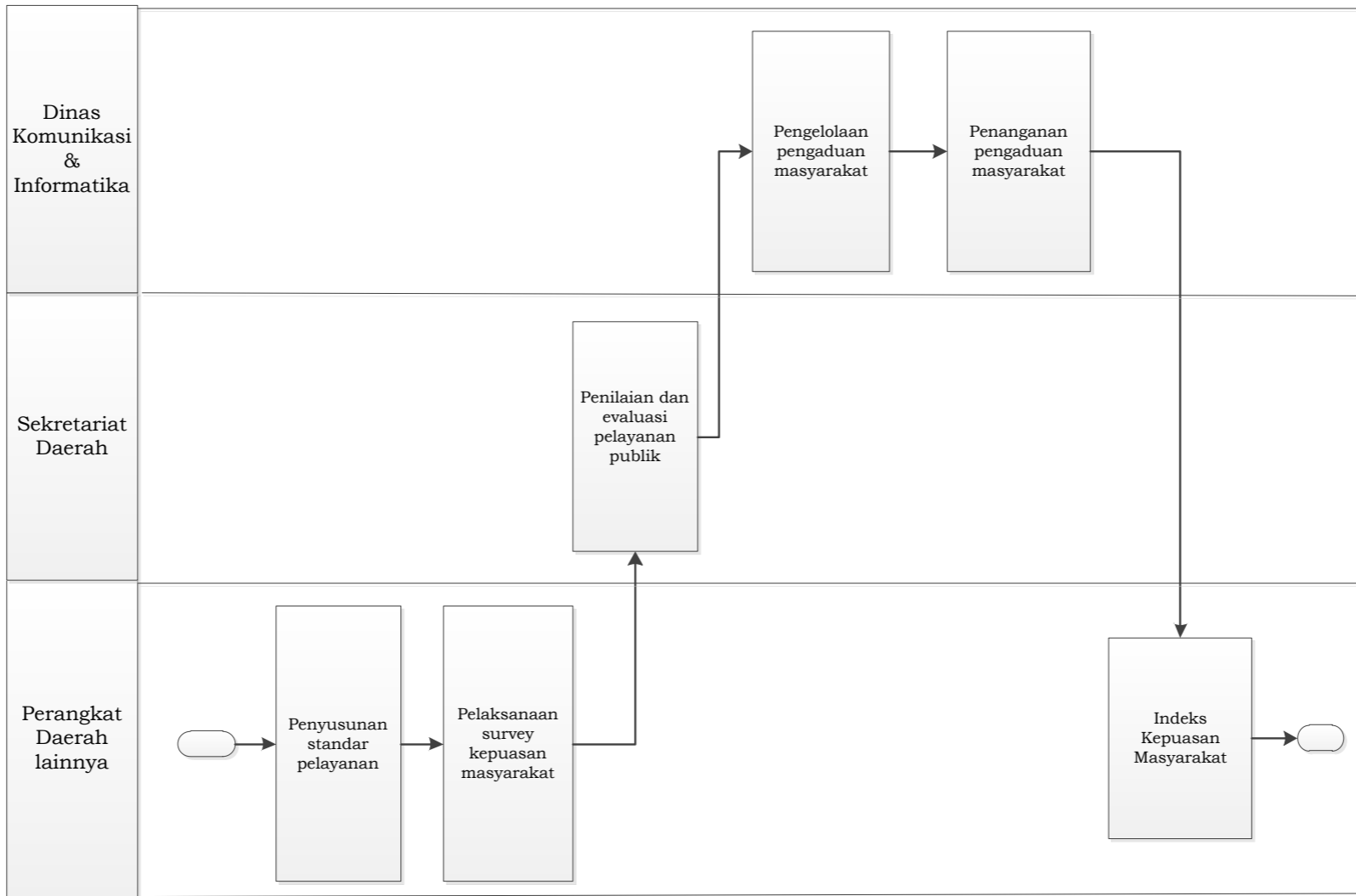
Sekretariat Daerah

Dinas Kominikasi dan Informatika

OPD Lainnya

PETA LINTAS FUNGSI

Peningkatan Sistem Pelayanan Publik
PYK – 07.1



PETA RELASI

PYK - 07.2
Peningkatan inovasi pelayanan publik

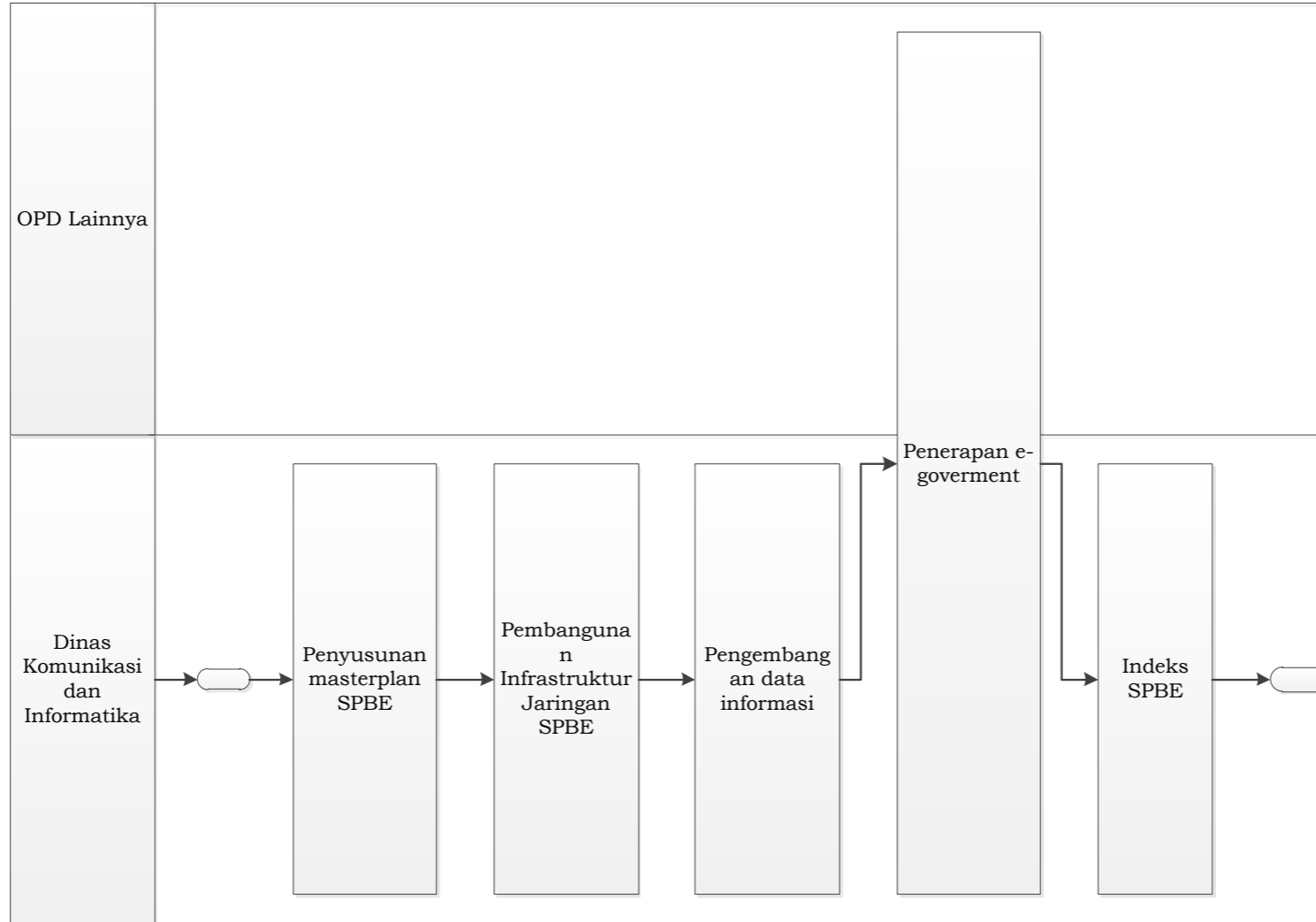
Bappeda

Setdako

PD lainnya

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 07.2
Peningkatan inovasi pelayanan publik



PETA SUB PROSES

PYK - 08
Teknologi Informasi dan Publikasi

PYK - 08.1
Tatakelola E-Government

PYK - 08.2
Informasi dan Komunikasi Publik

PETA RELASI

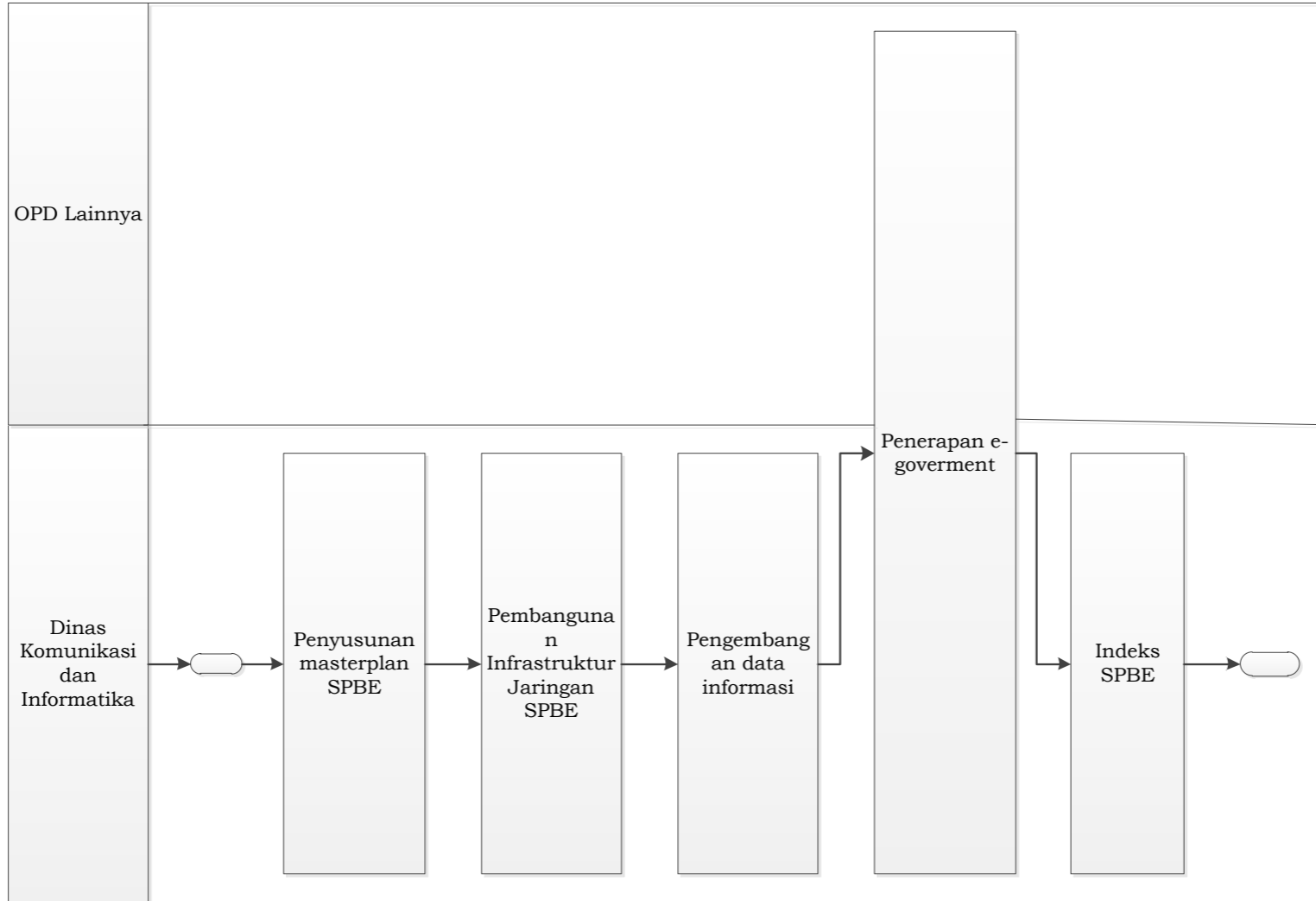
PYK - 08.1
Tatakelola E-Goverment

Dinas Komunikasi dan Informatika

OPD Lainnya

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 08.1
Tatakelola E-Government



PETA RELASI

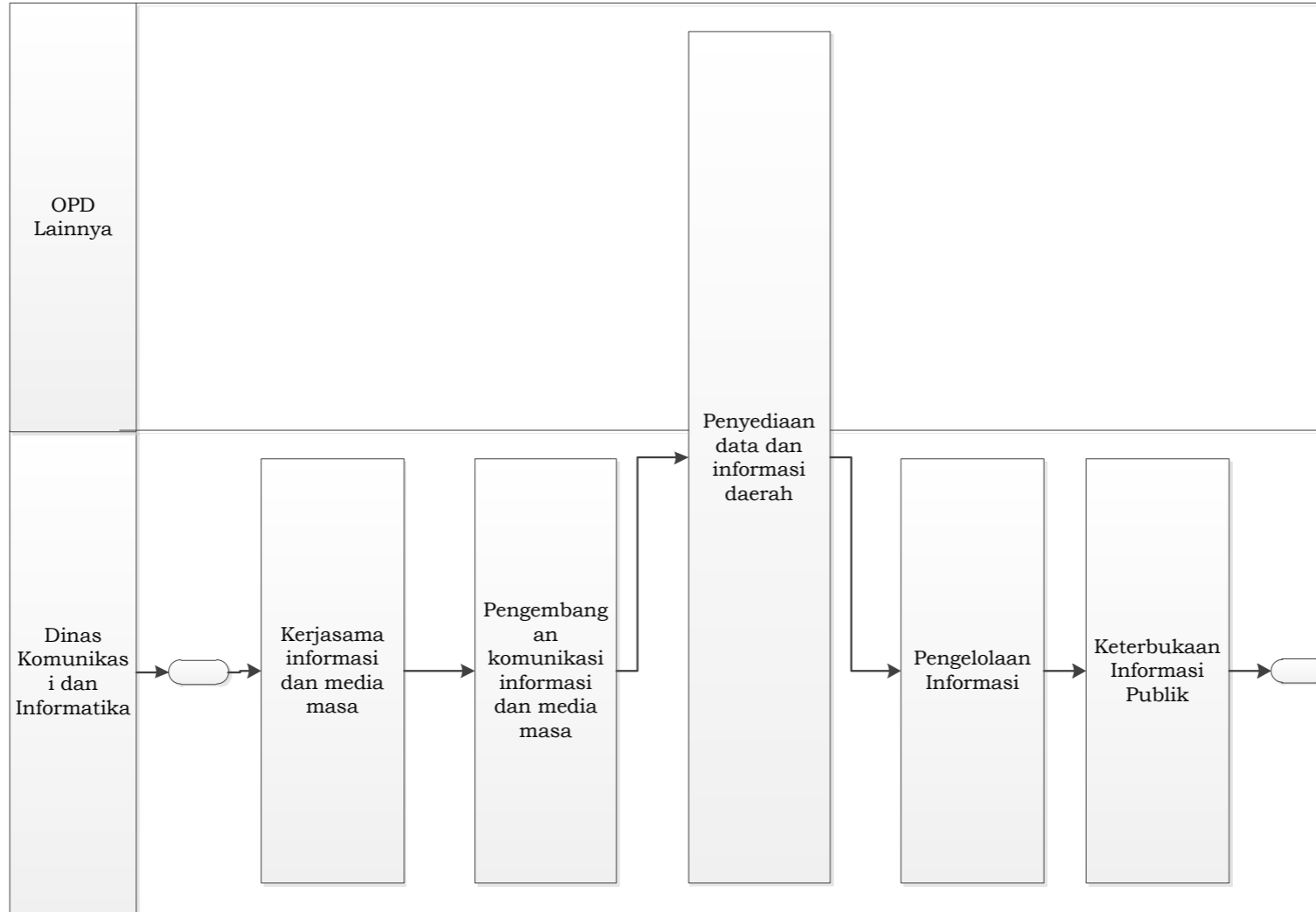
PYK – 08.2
Informasi dan Komunikasi Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika

OPD Lainnya

PETA LINTAS FUNGSI

PYK – 08.2
Informasi dan Komunikasi Publik



PETA SUB PROSES

PYK - 09
Penataan Sistem Manajemen SDM

PYK - 09.1
Peningkatan SDM Aparatur

PYK - 09.2
Manajemen SDM Aparatur

PETA RELASI

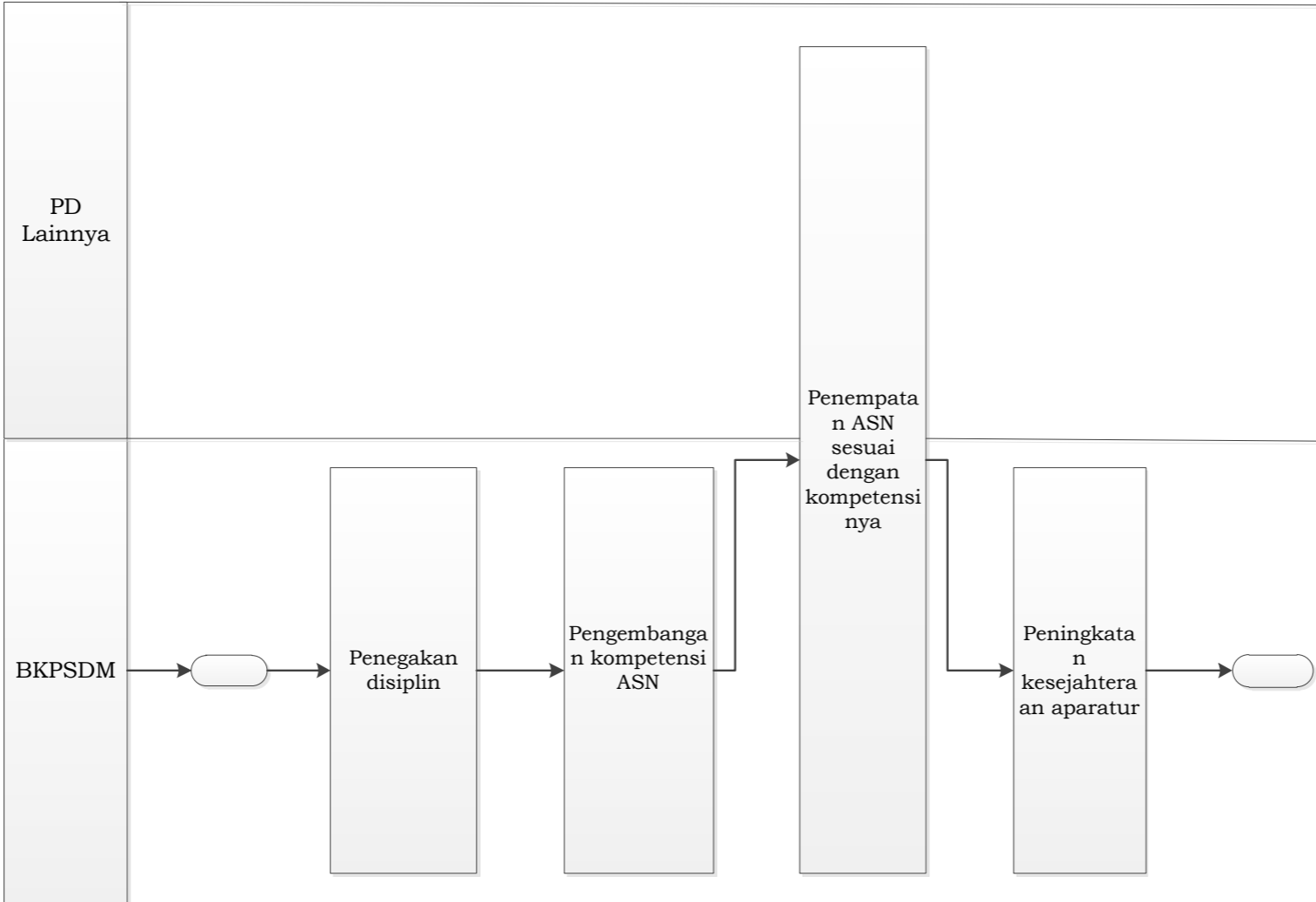
PYK – 09.1
Peningkatan SDM Aparatur

BKPSDM

PD Lainnya

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 09.1
Peningkatan SDM Aparatur



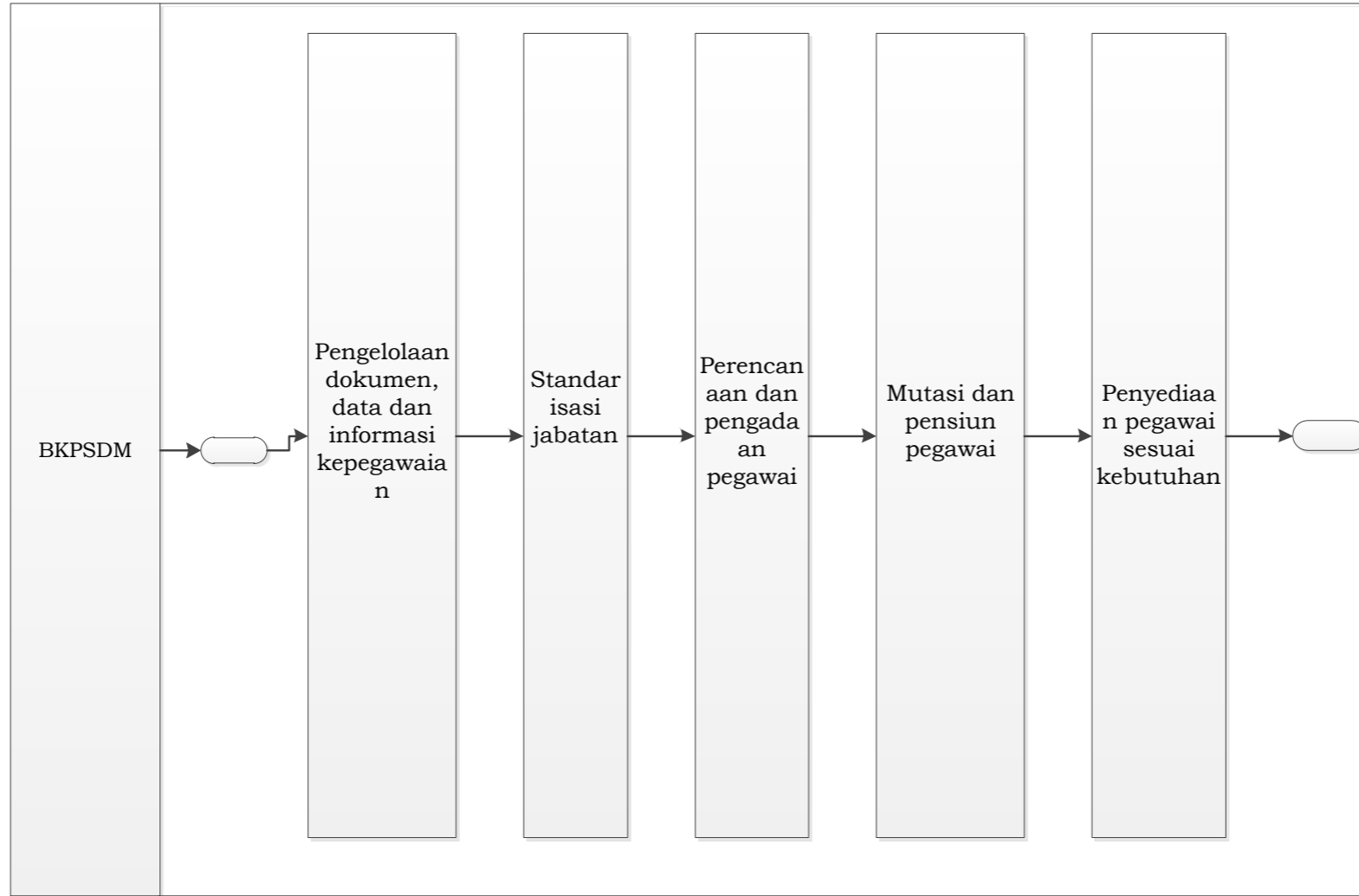
PETA RELASI

PYK – 09.2
Manajemen SDM Aparatur

BKPSDM

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 09.2
Manajemen SDM Aparatur



PETA SUB PROSES

PYK - 10
Perencanaan dan Penganggaran

PYK - 10.1
Perencanaan

PYK - 10.2
Pengelolaan Keuangan

PYK - 10.3
Pengelolaan Aset

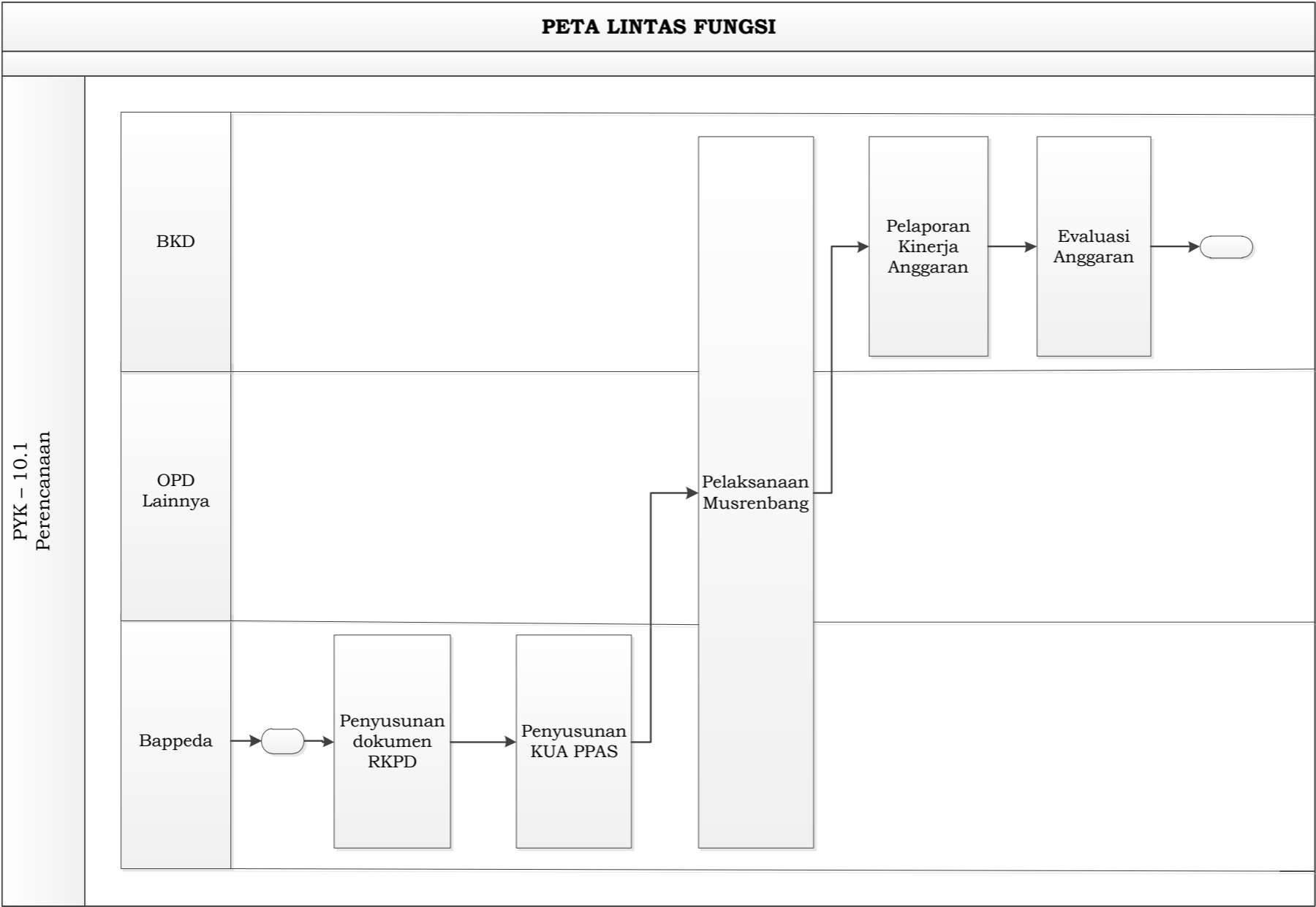
PETA RELASI

PYK – 10.1
Perencanaan

Bappeda

OPD Lainnya

BKD



PETA RELASI

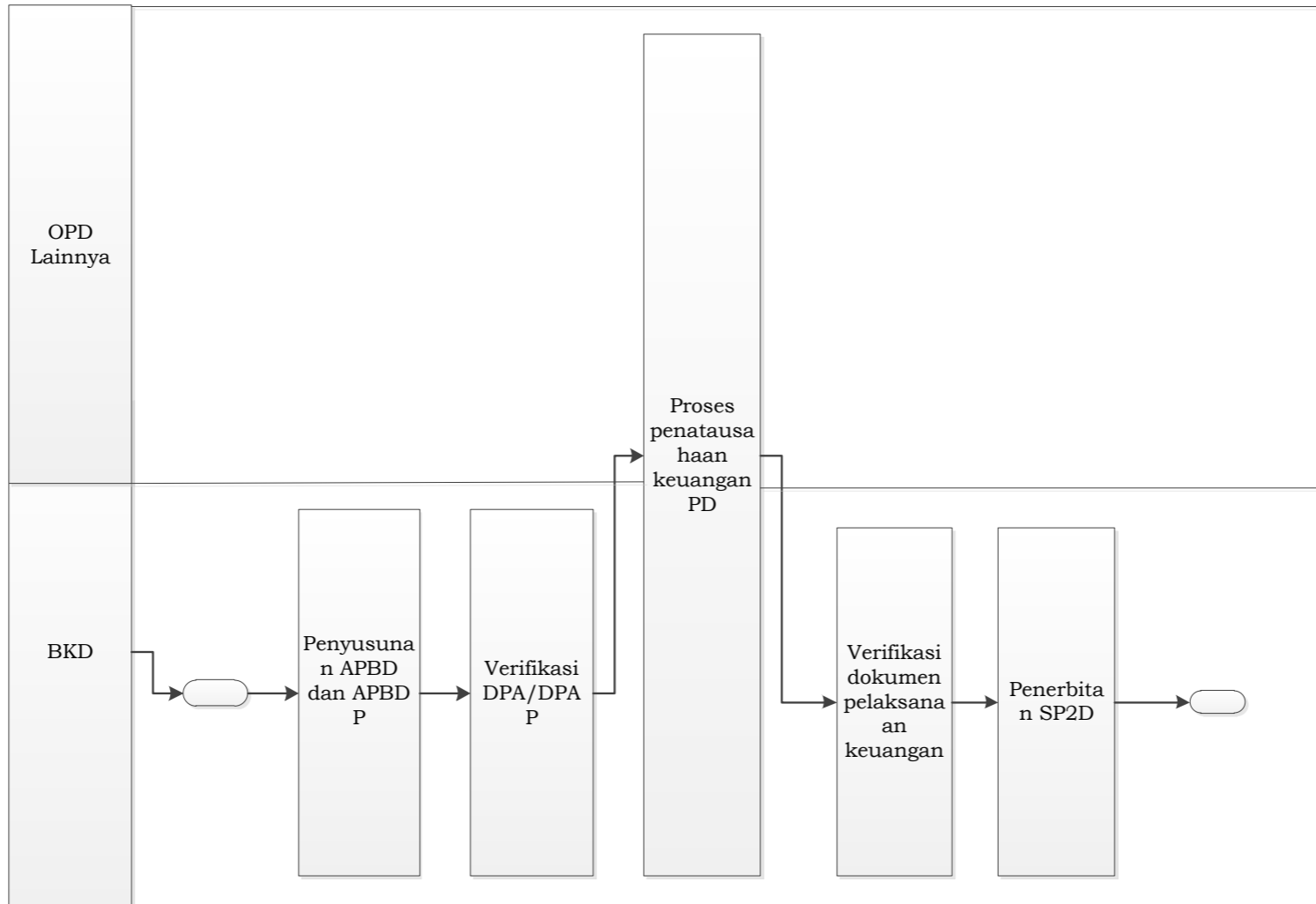
PYK - 10.2
Pengelolaan Keuangan

Badan Keuangan Daerah

OPD Lainnya

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 10.2
Pengelolaan Keuangan



PETA RELASI

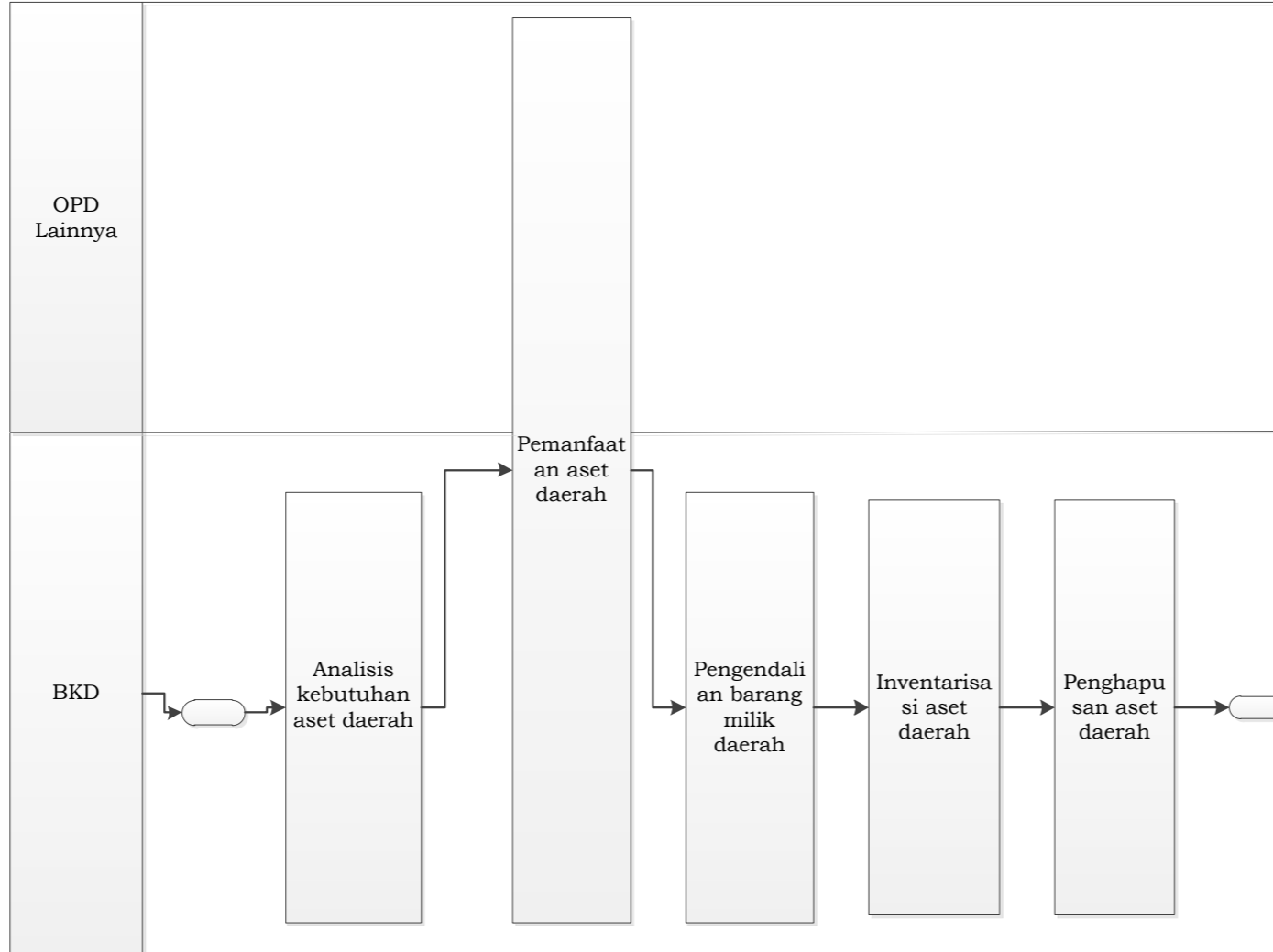
PYK – 10.3
Pengelolaan Aset

Badan Keuangan Daerah

OPD Lainnya

PETA LINTAS FUNGSI

PYK – 10.3
Pengelolaan Aset



PETA SUB PROSES

PYK - 11
Manajemen Pengawasan

PYK - 11.1
Pelaksanaan Pengawasan Internal

PYK - 11.2
Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
Internal

PYK - 11.3
Pembinaan Sistem Pengawasan Internal
(SPI)

PETA RELASI

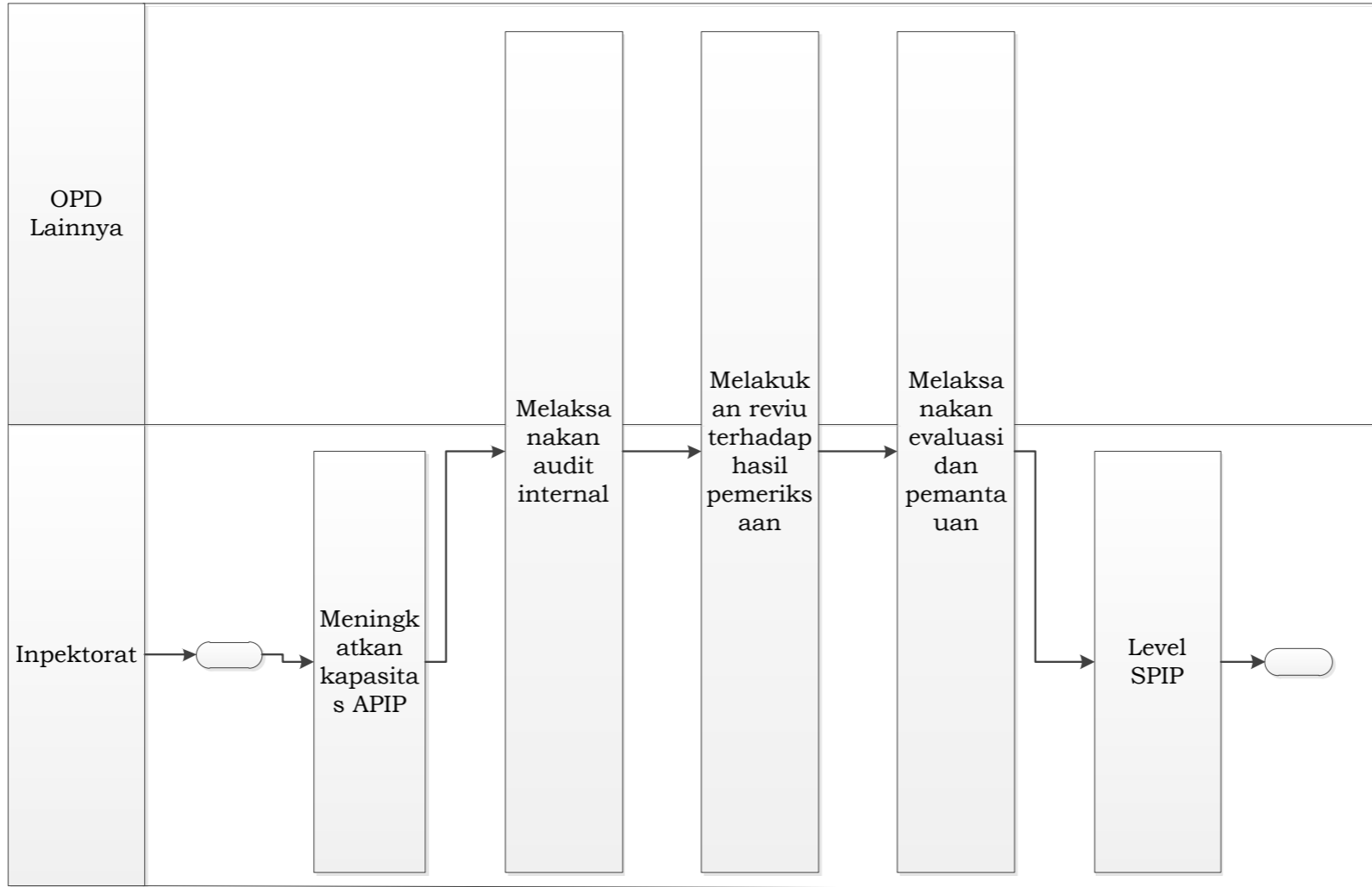
PYK – 11.1
Pelaksanaan Pengawasan Internal

Inspektorat

OPD Lainnya

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 11.1
Pelaksanaan Pengawasan Internal



PETA RELASI

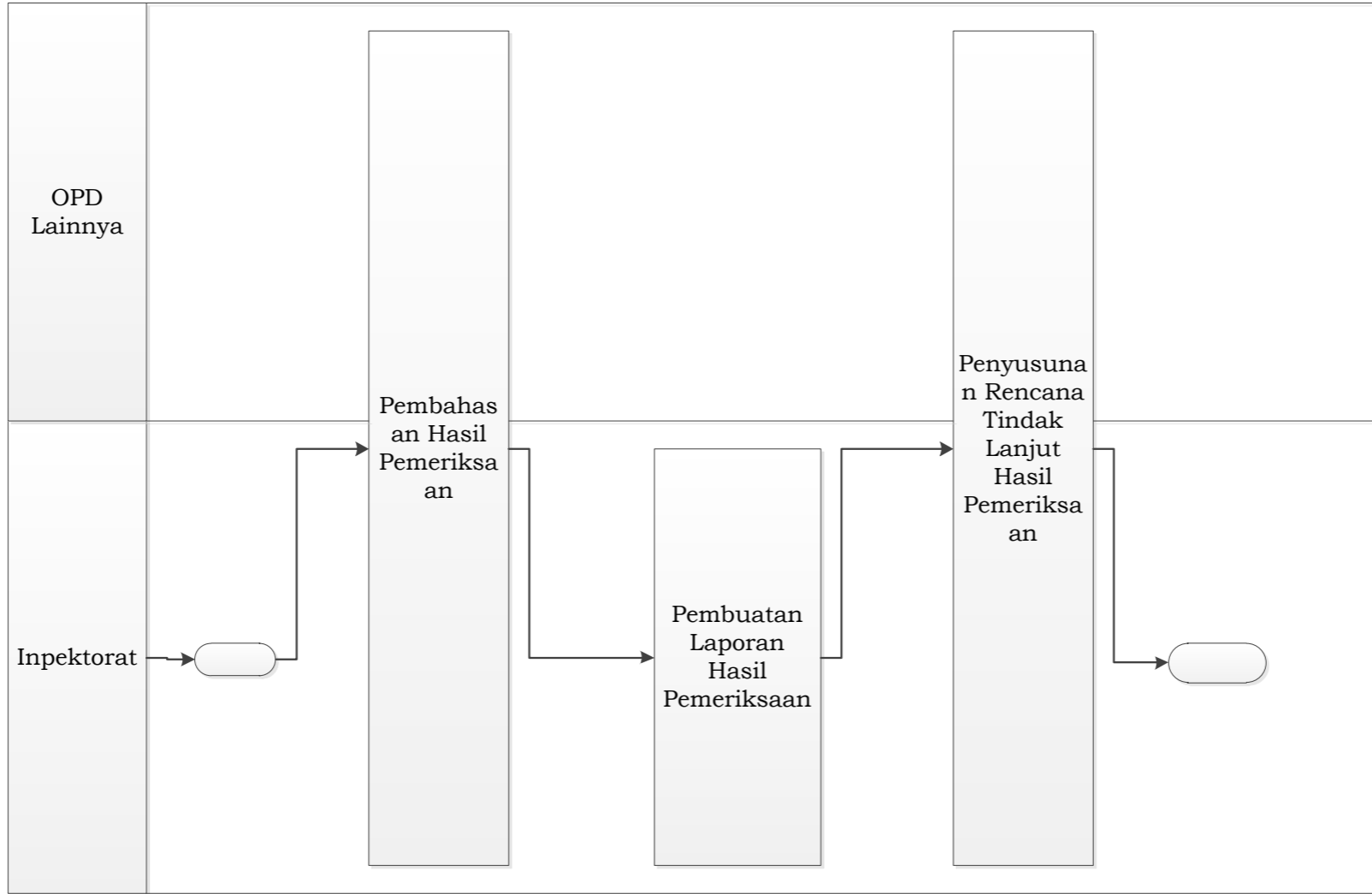
PYK - 11.2
Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Internal

Inpektorat

OPD Lainnya

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 11.2
Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Internal



PETA RELASI

PYK - 11.3
Pembinaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)

Inspektorat

OPD Lainnya

PETA LINTAS FUNGSI

PYK - 11.3
Pembinaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)

